

EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI SMP NEGERI 1 SENTOLO KABUPATEN KULON PROGO

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF THE ZONING SYSTEM POLICY IN ADMISSION OF NEW STUDENTS AT STATE MIDDLE SCHOOL 1 SENTOLO, KULON PROGO REGENCY

Oleh: Harvest Arta Latifah, Universitas Negeri Yogyakarta
artalatifah8@gmail.com

Abstrak

Evaluasi kebijakan zonasi penting dilakukan untuk menilai kesesuaian tujuan pemerataan akses pendidikan dengan realitas pelaksanaannya, sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam perbaikan kebijakan menuju Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Penelitian ini bertujuan: 1) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan zonasi dalam PPDB di SMP Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo berdasarkan model evaluasi CSE-UCLA, dan 2) mendeskripsikan faktor pendukung serta penghambat pelaksanaannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis evaluatif. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, panitia PPDB, guru, Widya Prada Ahli Muda Dinas Pendidikan, dan orang tua siswa. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan zonasi belum sepenuhnya mewujudkan pemerataan peserta didik. Kebijakan ini memang memperluas akses pendidikan, tetapi ketimpangan distribusi siswa masih terjadi akibat tingginya minat masyarakat terhadap sekolah tertentu. Faktor pendukung meliputi regulasi yang jelas dan kesiapan sekolah, sedangkan faktor penghambat mencakup keterbatasan daya tampung, persepsi sekolah favorit, serta kurang optimalnya sosialisasi dan pengawasan.

Kata kunci: evaluasi kebijakan, sistem zonasi, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)

Abstract

Evaluation is essential to assess the alignment between the objectives of the zoning policy in promoting equitable access to education and its implementation in schools, as well as to provide recommendations for improving the New Student Admissions System (SPMB). This study aims to: 1) evaluate the implementation of the zoning system in New Student Admissions (PPDB) at SMP Negeri 1 Sentolo, Kulon Progo Regency, based on the CSE-UCLA evaluation model, and 2) identify supporting and inhibiting factors in its implementation. This study employed a qualitative evaluative approach. Research subjects included the principal, PPDB committee, teachers, Widya Prada Young Expert of the Education Department, and parents. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed using the Miles and Huberman model, including data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. Data validity was ensured through source and technique triangulation. The findings reveal that the zoning policy has not fully achieved equitable student distribution. Although it has expanded access to education, disparities remain due to public preference for certain schools. Supporting factors include clear regulations and school readiness, while inhibiting factors involve limited capacity, perceptions of favorite schools, and insufficient socialization and supervision.

Keywords: policy evaluation, zoning system, New Student Admissions (PPDB)

PENDAHULUAN

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan kebijakan strategis dalam sistem pendidikan Indonesia karena berkaitan langsung dengan pemerataan akses pendidikan dan keadilan sosial. Sejak diterapkannya sistem zonasi melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui dalam Permendikbudristek Nomor 1 Tahun 2021 dan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, pemerintah berupaya mendekatkan peserta didik dengan sekolah di lingkungan tempat tinggalnya, mengurangi stigma sekolah favorit, serta menciptakan pemerataan kualitas pendidikan antarwilayah (Rachman & Erowati, 2023). Tetapi, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai persoalan di lapangan. Banyak masyarakat menilai sistem zonasi belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan karena adanya keterbatasan daya tampung, ketidaksesuaian pemetaan wilayah, hingga perbedaan kualitas antarsekolah yang masih dirasakan cukup mencolok (Klaronika & Lodan, 2020). Akibatnya, sekolah yang dianggap unggulan tetap menjadi pusat konsentrasi pendaftar, sedangkan sekolah lain mengalami kekurangan peserta didik (Gabrielle et al., 2024).

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Kulon Progo, khususnya pada

SMP Negeri 1 Sentolo yang menjadi salah satu sekolah dengan tingkat peminat tinggi. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo tahun 2023, jumlah pendaftar di SMP Negeri 1 Sentolo mencapai 200 calon peserta didik, sedangkan daya tampung sekolah hanya 128 siswa. Kondisi ini menyebabkan sekitar 72 calon peserta didik tidak dapat diterima dan harus dialihkan ke sekolah lain. Di sisi lain, beberapa SMP negeri lain di wilayah Sentolo justru mengalami tingkat keterisian bangku yang relatif rendah, hanya sekitar 60–70% dari kapasitas yang tersedia (Dikpora Kulon Progo, 2023).

Ketimpangan tersebut menunjukkan bahwa tujuan pemerataan peserta didik melalui sistem zonasi belum sepenuhnya tercapai. Tingginya minat masyarakat terhadap SMP Negeri 1 Sentolo dipengaruhi oleh persepsi kualitas sekolah, prestasi akademik dan nonakademik, fasilitas yang memadai, serta lokasi sekolah yang strategis (Sidik, 2024).

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan zonasi tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi, tetapi juga faktor sosial, geografis, dan persepsi masyarakat terhadap mutu sekolah (Datuk, 2020). Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi penting untuk menilai efektivitas, pemerataan, dan

responsivitas pelaksanaan sistem zonasi di tingkat satuan pendidikan (Febrianti et al., 2024). Penelitian ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB Tahun Ajaran 2024/2025 di SMP Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo menggunakan model evaluasi CSE-UCLA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai pelaksanaan kebijakan zonasi sekaligus menjadi bahan pertimbangan dalam penyempurnaan kebijakan penerimaan peserta didik baru menuju sistem domisili sebagaimana diatur dalam Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian evaluatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian evaluatif bertujuan untuk menilai pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo secara objektif dan mendalam. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena implementasi kebijakan berdasarkan kondisi nyata di lapangan melalui pengumpulan data deskriptif dari berbagai sumber (Sugiyono, 2023).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di SMP Negeri 1 Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan lokasi didasarkan pada tingginya jumlah pendaftar yang melebihi daya tampung sekolah sehingga relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan sistem zonasi. Penelitian dilaksanakan pada bulan Januari sampai Maret 2026.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memahami pelaksanaan kebijakan zonasi PPDB. Informan penelitian terdiri atas kepala sekolah, panitia PPDB, guru, Widya Prada Ahli Muda Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, serta orang tua peserta didik.

Prosedur Penelitian

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data,

dan penarikan kesimpulan. Pengumpulan data dilakukan dengan mengamati pelaksanaan PPDB, melakukan wawancara kepada informan, serta mengkaji dokumen terkait kebijakan dan pelaksanaan zonasi di sekolah. Evaluasi kebijakan dianalisis menggunakan model CSE-UCLA yang meliputi aspek system assessment, program planning, program implementation, program *improvement*, dan program certification.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen sekolah, arsip PPDB, serta peraturan terkait kebijakan zonasi. Instrumen utama penelitian adalah peneliti sendiri yang dibantu dengan pedoman observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi untuk memperkuat validitas data melalui triangulasi sumber dan teknik.

Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles

et al., 2014). Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Macam data, bagaimana data dikumpulkan, dengan instrumen yang mana data dikumpulkan, dan bagaimana teknis pengumpulannya, perlu diuraikan secara jelas dalam bagian ini.

Teknik Analisis Data

Bagaimana memaknakan data yang diperoleh, kaitannya dengan permasalahan dan tujuan penelitian, perlu dijabarkan dengan jelas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dalam PPDB di SMP Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Model Evaluasi CSE-UCLA

a. System Assessment (Penilaian Sistem)

Tahap penilaian sistem menunjukkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi lahir sebagai respons terhadap ketimpangan akses pendidikan, konsentrasi siswa pada sekolah tertentu, serta adanya

stigma sekolah favorit dan nonfavorit. Kebijakan ini memiliki dasar regulatif yang kuat melalui Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018 yang kemudian diperbarui dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru. Secara normatif, sistem zonasi dirancang untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan melalui pendekatan kedekatan domisili sehingga seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam mengakses layanan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala sekolah, guru, dan orang tua pada umumnya memahami tujuan utama kebijakan ini sebagai upaya pemerataan pendidikan. Mereka menilai sistem zonasi lebih manusiawi karena memudahkan pengawasan orang tua, mengurangi jarak tempuh siswa, dan membantu kedisiplinan waktu ke sekolah. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Sutanto, (2024) yang menyatakan bahwa masyarakat memandang zonasi sebagai langkah untuk mengurangi kesenjangan antarsekolah dan memperluas akses pendidikan secara merata.

Sistem zonasi secara konseptual mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam pelayanan publik karena pendidikan sebagai layanan dasar harus dapat diakses seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Penelitian Rahmi & Zulham, (2022) juga menunjukkan bahwa kebijakan zonasi mampu menurunkan rata-rata jarak tempuh siswa

dan meningkatkan pemerataan distribusi peserta didik antarsekolah negeri. Tetapi, hasil penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan dan realitas implementasi di lapangan. Mekanisme seleksi yang mempertimbangkan usia dalam satu zona memunculkan persepsi ketidakadilan karena jarak tempat tinggal tidak selalu menjadi faktor utama penentu kelulusan.

Kondisi ini menimbulkan resistensi masyarakat, sebagaimana ditemukan oleh (Tawakkal & Saiful, 2023), bahwa kebijakan zonasi sering dipersoalkan ketika mekanisme seleksi dianggap tidak konsisten dengan prinsip kedekatan wilayah. Penelitian (Iswahyudi et al., 2025) juga menegaskan bahwa persoalan utama zonasi bukan terletak pada tujuan kebijakannya, melainkan pada aturan operasional dan persepsi keadilan masyarakat terhadap proses seleksi. Dengan demikian, pada tahap system assessment dapat disimpulkan bahwa kebijakan zonasi di SMP Negeri 1 Sentolo telah relevan dengan kebutuhan pemerataan pendidikan, tetapi masih memerlukan penyempurnaan mekanisme teknis agar prinsip keadilan benar-benar dirasakan masyarakat.

b. *Program Planning (Perencanaan Program)*

Tahap perencanaan program menekankan kesiapan sumber daya, regulasi

operasional, dan daya tampung sekolah sebagai dasar implementasi kebijakan yang efektif. Dalam kebijakan PPDB sistem zonasi, perencanaan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga strategis karena menentukan keberhasilan pemerataan akses pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan diperbarui melalui Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa SMP Negeri 1 Sentolo telah membentuk panitia PPDB sejak awal serta memberikan pembekalan teknis melalui bimbingan dari Dinas Pendidikan. Dari sisi sumber daya manusia, kesiapan panitia dinilai cukup baik karena telah memahami penggunaan aplikasi dan petunjuk teknis pelaksanaan. Tetapi, pelatihan yang diberikan masih berfokus pada aspek teknis dasar sehingga ketika muncul kendala tertentu, panitia masih bergantung pada konsultasi dengan dinas pendidikan. Temuan ini sesuai dengan penelitian Rahma et al., (2026) yang menegaskan bahwa kapasitas teknis pelaksana sangat menentukan efektivitas layanan PPDB berbasis daring, khususnya dalam menghadapi persoalan operasional yang tidak dijelaskan secara rinci dalam juknis.

Gambar 1. Daya tampung per jalur PPDB



Dari sisi sarana prasarana, sekolah dinilai cukup siap karena telah memiliki ruang pelayanan, komputer, printer, dan jaringan internet untuk mendukung sistem pendaftaran daring. Meskipun demikian, gangguan eksternal seperti listrik dan kestabilan jaringan masih menjadi kendala potensial. Penelitian (Rahmah & Darmiyanti, 2021) menegaskan bahwa stabilitas infrastruktur digital sangat menentukan akuntabilitas dan transparansi sistem PPDB berbasis zonasi. Selain itu, penyusunan juknis oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo telah dilakukan secara sistematis melalui harmonisasi lintas sektor sehingga secara regulatif perencanaan dinilai telah sesuai ketentuan. Tetapi, implementasi di sekolah menunjukkan bahwa tidak semua dinamika lapangan dapat dijelaskan secara rinci dalam pedoman teknis. (Rizki & Ridwan, 2023) menyatakan bahwa tantangan utama PPDB sering muncul pada tahap interpretasi teknis di tingkat sekolah. Dalam aspek daya tampung, SMP Negeri 1 Sentolo menetapkan kapasitas 128 siswa dengan

pembagian kuota berdasarkan jalur zonasi, afirmasi, prestasi, dan perpindahan orang tua sesuai regulasi nasional. Tetapi, tingginya minat masyarakat menyebabkan jumlah pendaftar selalu melebihi kapasitas yang tersedia. Penelitian (Akhyar, 2024) menyebutkan bahwa fenomena kelebihan pendaftar di sekolah tertentu menunjukkan belum meratanya persepsi kualitas antarsekolah. Dengan demikian, tahap perencanaan program menunjukkan bahwa secara administratif kesiapan sekolah sudah cukup baik, tetapi masih terdapat tantangan struktural berupa keterbatasan kapasitas dan tingginya preferensi masyarakat terhadap sekolah tertentu.

c. Program Implementation (Implementasi Program)

Tahap implementasi program menunjukkan bagaimana kebijakan PPDB sistem zonasi diterapkan secara nyata di tingkat sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan PPDB di SMP Negeri 1 Sentolo dilakukan secara daring melalui sistem yang telah disediakan oleh Dinas Pendidikan. Jalur penerimaan meliputi zonasi/domisili, afirmasi, prestasi, dan perpindahan tugas orang tua sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 dan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025. Sekolah juga menyediakan layanan luring bagi orang tua yang mengalami kesulitan teknologi sehingga

akses layanan tetap terbuka bagi seluruh masyarakat. Transparansi sistem terlihat dari hasil seleksi yang dapat dipantau secara langsung melalui laman resmi, sementara proses pemerinkatan dilakukan otomatis oleh sistem sehingga meminimalkan intervensi manual panitia.

Gambar 2. Pamflet PPDB Tahun 2024/2025



Temuan ini sejalan dengan dengan penelitian (Mahajani & Maharani, 2025) yang menyatakan bahwa digitalisasi PPDB dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi potensi subjektivitas dalam proses seleksi.

Implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai kendala teknis dan nonteknis. Kendala teknis terutama berkaitan dengan literasi digital masyarakat, gangguan jaringan internet, serta kesalahan input data oleh pendaftar mandiri. Penelitian (Rahmayanny et al., 2021) juga menegaskan bahwa efektivitas PPDB daring tidak hanya ditentukan oleh kesiapan institusi, tetapi juga oleh kesiapan pengguna layanan dalam mengakses teknologi digital. Selain itu,

kendala nonteknis muncul dalam bentuk persepsi masyarakat terhadap mekanisme zonasi. Beberapa orang tua masih kurang memahami ketentuan jalur penerimaan dan mekanisme pemilihan sekolah sehingga memunculkan protes serta persepsi ketidakadilan. Guru di SMP Negeri 1 Sentolo menilai bahwa secara prinsip sistem zonasi sudah objektif karena berbasis jarak dan kuota yang jelas, namun literasi masyarakat terhadap juknis belum merata, di sisi lain, implementasi zonasi juga belum sepenuhnya mampu menghilangkan ketimpangan antarsekolah karena SMP Negeri 1 Sentolo masih menjadi sekolah yang paling diminati dibanding sekolah lain di wilayah sekitarnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan pemerataan pendidikan belum tercapai secara optimal. Selain itu, aspek pengawasan dan sosialisasi kebijakan dinilai masih kurang sehingga kesalahan pemahaman masyarakat terus berulang setiap tahun. Dengan demikian, implementasi PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 1 Sentolo telah berjalan sesuai prosedur dan prinsip transparansi, tetapi efektivitasnya masih dipengaruhi oleh literasi digital, kualitas komunikasi kebijakan, dan persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem.

d. Program Improvement (Perbaikan/Peningkatan Program)

Tahap perbaikan program merupakan proses refleksi terhadap kelemahan implementasi sekaligus penyusunan langkah korektif untuk periode berikutnya. Perbaikan kebijakan PPDB sistem zonasi dalam penelitian ini terutama difokuskan pada penguatan mekanisme verifikasi domisili. Dinas Pendidikan Kabupaten Kulon Progo menemukan adanya praktik manipulasi titik koordinat dan penggunaan surat keterangan domisili pada periode sebelumnya sehingga dilakukan pengetatan syarat administratif melalui kewajiban penggunaan Kartu Keluarga minimal satu tahun sebelum pelaksanaan PPDB. Langkah tersebut menunjukkan adanya adaptive policy response atau penyesuaian kebijakan berdasarkan pengalaman empiris di lapangan guna menjaga integritas sistem zonasi. Penelitian Rachman & Erowati (2023) juga menyebutkan bahwa manipulasi alamat domisili merupakan salah satu persoalan utama dalam implementasi awal sistem zonasi sehingga diperlukan penguatan verifikasi faktual dan integrasi data kependudukan.

Penelitian (Kasbijanto et al., 2025) menegaskan bahwa integrasi sistem PPDB dengan *database* kependudukan mampu mengurangi manipulasi administratif dan meningkatkan akurasi seleksi berbasis

domisili. Di tingkat sekolah, perbaikan program lebih bersifat adaptif dan mengikuti kebijakan dinas pendidikan. Kepala sekolah menyampaikan bahwa evaluasi formal belum dilakukan secara intensif karena sistem utama ditentukan pemerintah daerah, sementara sekolah lebih berfokus pada penyesuaian internal terhadap karakteristik siswa yang diterima dan peningkatan kualitas pembelajaran. Panitia PPDB tetap melakukan evaluasi informal berdasarkan kendala yang muncul selama pelaksanaan, seperti gangguan aplikasi, kesalahan input data, dan keluhan masyarakat. Rekomendasi yang muncul antara lain peningkatan kesiapan sistem digital, penguatan integrasi data kependudukan, serta pembekalan teknis yang lebih mendalam bagi panitia. Hal ini menunjukkan bahwa proses *improvement* berlangsung secara *incremental* atau bertahap berdasarkan pengalaman implementasi sebelumnya. Secara keseluruhan, tahap perbaikan program memperlihatkan bahwa kebijakan PPDB sistem zonasi bersifat dinamis dan terus mengalami penyempurnaan. Tetapi, evaluasi yang masih informal menunjukkan perlunya mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih sistematis agar proses pembelajaran kebijakan dapat terdokumentasi dengan baik dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di masa mendatang.

e. *Program Certification (Sertifikasi Program)*

Tahap sertifikasi program merupakan evaluasi akhir untuk menentukan apakah kebijakan layak dilanjutkan berdasarkan capaian objektif dan tingkat penerimaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kebijakan zonasi dinilai berhasil memperluas akses pendidikan dan meningkatkan partisipasi sekolah di Kabupaten Kulon Progo. Dinas Pendidikan menilai keberhasilan program melalui indikator seperti angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah yang menunjukkan tren positif. Dalam perspektif evaluasi kebijakan publik, capaian tersebut dapat dikategorikan sebagai *outcome* positif karena memperlihatkan bahwa layanan pendidikan telah menjangkau sebagian besar anak usia sekolah. Namun demikian, keberhasilan administratif belum sepenuhnya diikuti oleh kepuasan masyarakat. Wawancara dengan orang tua menunjukkan masih adanya persepsi ketidakadilan, terutama terkait prioritas seleksi antara jarak domisili, usia, dan nilai akademik. Meskipun mekanisme tersebut sah secara regulasi, sebagian masyarakat belum sepenuhnya menerima hasil seleksi sebagai bentuk keadilan substantif. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Finorita & Wahyudin, 2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan kebijakan pendidikan tidak

hanya diukur dari kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dari tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses dan hasil kebijakan.

Dari sisi keberlanjutan, kepala sekolah menilai bahwa sistem zonasi memiliki prospek jangka panjang karena sejalan dengan tujuan pemerataan pendidikan. Namun, keberlanjutan tersebut sangat bergantung pada kesiapan sekolah dalam mengelola heterogenitas peserta didik, termasuk kesiapan sarana, dukungan pembelajaran, dan kompetensi guru dalam menanggapi kebutuhan siswa yang beragam. Demikian menunjukkan bahwa sustainability kebijakan tidak hanya dipengaruhi desain regulasi, tetapi juga kapasitas institusional sekolah sebagai pelaksana utama. Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukkan bahwa PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 1 Sentolo telah memenuhi standar administratif dan menunjukkan capaian positif dalam pemerataan akses pendidikan. Tetapi, tingkat legitimasi sosial masih beragam karena dipengaruhi persepsi masyarakat terhadap keadilan seleksi dan kualitas sekolah tertentu. Oleh karena itu, program dinilai layak untuk dilanjutkan dengan catatan perlu adanya penyempurnaan pada aspek komunikasi publik, penguatan kapasitas sekolah, dan penyesuaian mekanisme seleksi agar lebih adaptif terhadap dinamika sosial masyarakat.

Penerapan model evaluasi CSE-UCLA dalam penelitian ini juga terbukti efektif karena mampu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan dinamika sosial kebijakan secara komprehensif melalui tahapan system assessment, program planning, program implementation, program *improvement*, dan program certification. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa dalam konteks kebijakan zonasi, dimensi persepsi keadilan dan penerimaan sosial masyarakat menjadi faktor penting yang sangat memengaruhi efektivitas kebijakan pendidikan.

Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Sistem zonasi dalam PPDB

a. Faktor Pendukung

Keberhasilan implementasi kebijakan PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 1 Sentolo dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung yang bersifat normatif, teknis, struktural, dan organisasional. Dari sisi normatif, kepala sekolah menegaskan bahwa tujuan kebijakan sudah jelas, yaitu untuk mewujudkan pemerataan akses pendidikan dan mengurangi jarak tempuh siswa menuju sekolah. Kejelasan tujuan tersebut menjadi dasar penting dalam menjaga arah implementasi agar tetap selaras dengan prinsip keadilan pendidikan. Selain itu, penggunaan sistem pendaftaran berbasis daring juga memperkuat

transparansi karena hasil seleksi dapat dipantau langsung oleh masyarakat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Simbolon et al., 2025) yang menyatakan bahwa sistem PPDB online mampu mempercepat akses informasi, meningkatkan transparansi, serta memperkuat keadilan dalam proses seleksi peserta didik baru. Dengan demikian, digitalisasi layanan PPDB tidak hanya mempermudah administrasi, tetapi juga meningkatkan akuntabilitas publik dalam pelayanan pendidikan.

Dari sisi teknis, sekolah dinilai memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai seperti ruang layanan, perangkat komputer, dan jaringan internet untuk mendukung pelaksanaan PPDB berbasis daring. Infrastruktur digital yang relatif stabil membantu meminimalkan gangguan operasional selama proses pendaftaran berlangsung. Selain itu, aspek organisasional juga menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan implementasi. Panitia PPDB menunjukkan kerja sama tim yang solid dengan pembagian tugas yang jelas serta koordinasi satu pintu dalam menghadapi persoalan yang muncul dari masyarakat. Pola komunikasi yang terstruktur membantu menjaga stabilitas pelaksanaan dan mengurangi potensi konflik selama masa pendaftaran. Dari sisi struktural, keterlibatan berbagai pihak dalam penyusunan regulasi daerah juga

memperkuat legitimasi kebijakan. Dinas Pendidikan melibatkan berbagai unsur dalam penyusunan aturan sehingga kebijakan tidak dipandang sepihak. Temuan ini sesuai dengan penelitian (Ratrisulla & Ibtu, 2020) yang menunjukkan bahwa partisipasi multipihak dalam pelaksanaan PPDB zonasi dapat meningkatkan pemahaman, kepuasan, dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan pendidikan. Secara keseluruhan, faktor pendukung pelaksanaan PPDB sistem zonasi di SMP Negeri 1 Sentolo menunjukkan adanya kesiapan sumber daya, koordinasi kelembagaan, dan dukungan regulatif yang cukup kuat untuk menjaga implementasi kebijakan tetap berjalan transparan dan terarah.

Dalam perspektif evaluasi CSE-UCLA, temuan ini memperkuat dimensi program planning dan program implementation yang menekankan pentingnya kesiapan sumber daya, kejelasan tujuan, dan dukungan organisasi dalam keberhasilan program. Hasil penelitian ini juga mendukung pandangan Rossi, Lipsey, dan Freeman (2019) bahwa evaluasi kebijakan bertujuan menilai keberhasilan program berdasarkan standar efektivitas dan kebermanfaatan yang telah ditetapkan. Namun demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tersebut dengan menunjukkan bahwa legitimasi sosial dan persepsi masyarakat terhadap keadilan kebijakan

juga menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas implementasi sistem zonasi.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Sentolo juga menghadapi sejumlah hambatan yang berkaitan dengan aspek akademik, administrasi, sosial, dan teknis. Kepala sekolah menyampaikan bahwa keberagaman kemampuan akademik siswa menjadi tantangan utama dalam proses pembelajaran. Dengan sistem zonasi, sekolah menerima peserta didik dengan latar belakang kemampuan yang lebih heterogen karena seleksi tidak lagi didominasi nilai akademik. Kondisi ini menuntut guru untuk menerapkan strategi pembelajaran yang lebih adaptif dan diferensiatif agar seluruh siswa dapat mengikuti proses belajar secara optimal. Selain itu, kesiapan layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus juga dinilai belum maksimal, baik dari sisi tenaga pendidik maupun fasilitas pendukung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerataan akses pendidikan belum sepenuhnya diimbangi dengan pemerataan kualitas layanan pendidikan di sekolah.

Dari aspek administratif, ketentuan penggunaan Kartu Keluarga (KK) minimal satu tahun sering menimbulkan persoalan bagi masyarakat yang mengalami perubahan data kependudukan, seperti pergantian anggota keluarga atau penerbitan KK baru.

Guru menyampaikan bahwa aturan yang terlalu ketat terkadang menyulitkan masyarakat yang sebenarnya telah lama berdomisili di wilayah tertentu, tetapi tidak dapat memenuhi persyaratan administratif secara formal. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara prinsip kepastian hukum dan kebutuhan fleksibilitas dalam menghadapi realitas sosial masyarakat. Dari sisi sosial dan teknis, literasi digital masyarakat yang belum merata juga menjadi kendala dalam pelaksanaan PPDB daring. Sebagian masyarakat masih memerlukan pendampingan dalam proses pendaftaran karena belum terbiasa menggunakan sistem digital. Akibatnya, sering terjadi kesalahan input data, kebingungan memilih jalur pendaftaran, serta ketergantungan terhadap bantuan sekolah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Simbolon et al. (2025) yang menegaskan bahwa kesiapan pengguna (user readiness) menjadi faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan berbasis digital.

Selain kendala teknis dan administratif, hambatan juga muncul dalam bentuk persepsi dan resistensi sosial dari masyarakat. Sebagian orang tua masih mempersoalkan mekanisme seleksi karena merasa aturan belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan menurut perspektif mereka. Perbedaan antara keadilan normatif berdasarkan aturan dan keadilan persepsional berdasarkan harapan

masyarakat menjadi sumber munculnya keluhan selama proses PPDB berlangsung. Dengan demikian, faktor penghambat implementasi sistem zonasi lebih banyak berkaitan dengan kesiapan substantif sekolah dan kemampuan masyarakat dalam beradaptasi terhadap perubahan sistem. Dalam kerangka evaluasi CSE-UCLA, hambatan tersebut menunjukkan tantangan pada tahap program implementation dan program *improvement*, khususnya dalam aspek responsivitas kebijakan terhadap kondisi sosial masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan (Hayat, 2019) yang menekankan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan tidak hanya diukur dari kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kemampuan kebijakan untuk dipahami, diterima, dan dirasakan adil oleh masyarakat sebagai pengguna layanan pendidikan.

Relevansi Hasil Penelitian terhadap Perubahan Kebijakan SPMB Sistem Domisili

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 1 Sentolo masih menghadapi sejumlah dinamika implementasi, baik yang berkaitan dengan ketimpangan jumlah pendaftar antarsekolah, keterbatasan daya tampung, pemahaman masyarakat terhadap mekanisme zonasi, kesiapan administrasi sekolah, maupun persepsi keadilan dalam penerimaan peserta didik baru.

Konteks kebijakan terbaru yaitu SPMB sistem domisili, pemerintah telah melakukan penyesuaian kebijakan melalui pendekatan sistem domisili. Tetapi, substansi utama kebijakan tetap mengarah pada prinsip pemerataan akses pendidikan berdasarkan tempat tinggal peserta didik. Oleh sebab itu, temuan penelitian ini tetap relevan sebagai bahan evaluasi terhadap proses transformasi kebijakan tersebut.

Beberapa persoalan yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti perlunya transparansi informasi kepada masyarakat, ketepatan verifikasi data tempat tinggal, dan kebutuhan pemerataan mutu sekolah, masih menjadi isu penting dalam implementasi domisili saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa evaluasi terhadap sistem zonasi tetap memiliki kontribusi dalam memahami efektivitas kebijakan penerimaan peserta didik baru secara keberlanjutan. Dalam perspektif evaluasi kebijakan, perubahan dari sistem zonasi menuju sistem domisili dapat dipahami sebagai bentuk pembelajaran kebijakan (*Policy Learning*), yaitu proses perbaikan kebijakan berdasarkan pengalaman implementasi sebelumnya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam

PPDB di SMP Negeri 1 Sentolo Kabupaten Kulon Progo secara umum telah berjalan sesuai dengan regulasi dan petunjuk teknis yang berlaku, namun tujuan utama kebijakan untuk menciptakan pemerataan pendidikan belum sepenuhnya tercapai. Berdasarkan evaluasi model CSE-UCLA melalui tahapan *system assessment*, *program planning*, *program implementation*, *program improvement*, dan *program certification*, ditemukan bahwa kebijakan zonasi telah dipahami sebagai upaya pemerataan akses pendidikan dan pengurangan kesenjangan antarsekolah. Akan tetapi, tingginya minat masyarakat terhadap SMP Negeri 1 Sentolo dibandingkan daya tampung yang tersedia menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas dan reputasi sekolah masih sangat memengaruhi pilihan sekolah. Pada tahap perencanaan dan implementasi, sekolah dan Dinas Pendidikan telah melaksanakan koordinasi, sosialisasi, serta mekanisme seleksi sesuai aturan, namun efektivitas komunikasi kepada masyarakat masih belum optimal sehingga menimbulkan kesalahpahaman terkait sistem zonasi. Selain itu, implementasi kebijakan juga menunjukkan bahwa zonasi belum sepenuhnya mampu mengurangi konsentrasi peserta didik pada sekolah tertentu maupun mewujudkan distribusi siswa yang lebih merata.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa faktor pendukung utama kebijakan ini terletak pada kesiapan sistem, kejelasan regulasi, pelaksanaan pendaftaran daring yang relatif tertib, serta komitmen sekolah dalam menjalankan aturan secara transparan dan konsisten. Sebaliknya, faktor penghambat utama berasal dari ketimpangan persepsi kualitas antarsekolah, keterbatasan daya tampung, serta pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada reputasi sekolah tertentu. Dengan demikian, hambatan implementasi tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga berkaitan dengan belum meratanya mutu pendidikan secara menyeluruh. Oleh karena itu, kebijakan sistem zonasi dinilai tetap layak untuk dilanjutkan dengan berbagai penyempurnaan, terutama pada aspek pemerataan mutu pendidikan, penguatan sosialisasi kebijakan, akurasi pemetaan wilayah zonasi, dan peningkatan kapasitas sekolah dalam menghadapi heterogenitas peserta didik. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan zonasi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga oleh kemampuan kebijakan dalam menjawab realitas sosial dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. petunjuk teknis yang berlaku, namun tujuan utama kebijakan untuk menciptakan pemerataan pendidikan.

Saran

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada satu sekolah dan tidak menggunakan metode observasi secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode observasi langsung untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan PPDB sistem zonasi di sekolah. Dengan observasi secara langsung, peneliti mampu melihat bagaimana tantangan, strategi adaptasi sekolah, serta dampak kebijakan ini terhadap siswa, guru, dan masyarakat secara lebih nyata.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhyar, Y. (2024). Implementasi Sistem Zonasi Pada Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB): Studi Kasus SMAN 2 Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 105–118. <https://doi.org/https://doi.org/10.70437/edusiana.v2i1.526>
- Datuk, A. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orangtua untuk Mendapatkan Pendidikan Anak yang Bermutu di Kota Kupang. *Attractive: Innovative Education Journal*, 2(2).
- Dikpora Kulon Progo. (2023). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Dan Sekolah Menengah Pertama.
- Febrianti, N. A., Devi, A. S., Arifah, A. S., & Dwi, N. (2024). Evaluasi Kebijakan Publik. *Journal Education and Counseling*, 5(1), 85–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.36841/consiliu.m.v5i1.5299>
- Finorita, E. tantia, & Wahyudin, U. R. (2025). Persepsi Siswa Terhadap Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2024 di SMAN 1 Cikarang Pusat Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan. *Jurnal Tahsinia*, 6(11), 1698–1713.
- Gabrielle, N., Slamet Santoso, R., & Kismartini. (2024). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Dalam Sistem Zonasi Sekolah Menengah Atas Negeri di Jakarta Selatan. *Nova Idea: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Hayat. (2019). *Buku Kebijakan Publik*.
- Iswahyudi, S., Sunarya, A., & Kamariyah, S. (2025). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Waru. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 3(November). <https://doi.org/https://doi.org/10.62383/risoma.v3i6.1273>
- Kasbijanto, Haq, M. S., Amalia, K., & Khamidi, A. (2025). Analisis Kebijakan Integrasi Dapodik Dengan Sistem PPDB Online di SMP Negeri Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Pendidikan Guru*, 6(4), 739–750.
- Klaronika, M. S., & Lodan, K. T. (2020). Penerapan Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru Dengan Sistem Zonasi Pada Tingkat Sekolah Menengah Atas Di Kota Batam. *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 5(4).
- Mahajani, H., & Maharani, I. (2025). Transformasi Pendidikan Madrasah melalui PPDB Digital, 4(1), 37–47. <https://doi.org/https://doi.org/10.37348/aksi.v4i1.828>

- Rachman, N. I., & Erowati, D. (2023). Evaluasi Kebijakan dalam Sistem PPDB di SMA Negeri 1 Salatiga pada Tahun 2023. *Journal of Politic and Government Studies*, 14(4).
- Rahma, E. A., Meirinawati, Fanida, E. H., & Niswah, F. (2026). Efektivitas Pelayanan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Lamongan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 3(7), 39–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.63822/b1tket57>
- Rahmah, S. N., & Darmiyanti, A. (2021). Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online di Sekolah Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 6(2), 130–135. <https://doi.org/https://doi.org/10.18860/jmpi.v6i2.12375>
- Rahmayanny, Z., Susanto, H., & Mulyani, S. (2021). Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Secara Online Di SMPN 21 Batam Kepulauan Riau. *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 4(3).
- Rahmi, S., & Zulham, S. W. (2022). Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Rekrutmen Peserta Didik Tingkat Sekolah Dasar Di Dinas Pendidikan Gayo Lues. *Journal of Education Sciences and Teacher Training* 11, 160–168. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ji.v11i02.17184>
- Ratrisulla, M., & Ibtu, I. (2020). Penilaian Kepuasan Multi Pihak Terhadap Program Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi Di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Enersia Publika*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jep.v4i1.792>
- Rizki, T. M., & Ridwan, M. (2023). Administration: Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 14(2), 205–220. <https://doi.org/10.23960/administratio.v14i2.408>
- Sidik, F. (2024). Pelaksanaan kebijakan zonasi sekolah dan dampaknya terhadap kualitas sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama: Studi kasus di Kabupaten Sleman Yogyakarta. *Humanika*, 24(1), 47–56. <https://doi.org/10.21831/hum.v24i1.68551>
- Simbolon, J. R. L., Utami, S. M., & Lestari, A. (2025). Efektivitas Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Online dalam Meningkatkan Transparansi dan Mutu Layanan Pendidikan. *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).
- Sugiyono.(2023). Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif.
- Sutanto. (2024). Kebijakan Zonasi Sekolah di Indonesia: Kajian Literatur Mengenai Penyimpangan dan Implikasinya. *JGSD: Jurnal Guru Sekolah Dasar*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.70277/jgsd.v1i3.1>
- Tawakkal, & Saiful. (2023). Resistensi Sekolah Eks-Unggulan Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(2), 340–353. <https://doi.org/https://doi.org/10.31959/jat.v2i2.1958>